

AKTOR/STAKEHOLDERS KEBIJAKAN PUBLIK

Perkuliah KE- 3
DR. NOVITA TRESIANA

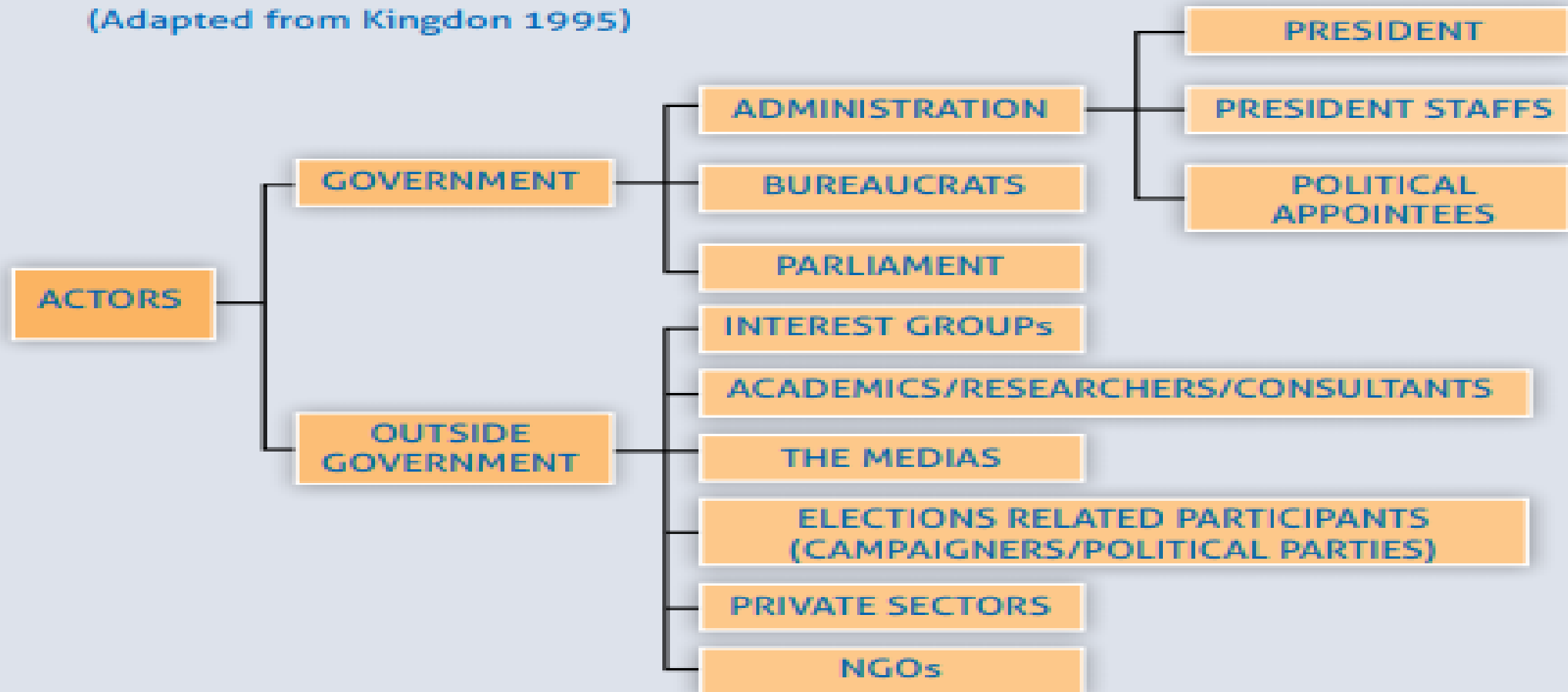
APA ITU AKTOR?

Aktor dalam kebijakan publik dalam lingkup kebijakannya paling tidak dapat diidentifikasi dalam 3 jenis lingkungan kebijakan, yaitu:

1. Lokal, lingkup kebijakan bersifat lokal atau ada di tingkat daerah, yang sifatnya teknis dan erat kaitannya dengan isu-isu lokal, kebijakannya dapat merupakan turunan (teknis atau implementatif) dari kebijakan yang ada di atasnya (makro).
2. Nasional, lingkup kebijakannya secara nasional dan berupa penggarisan masalah-masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu.
3. Internasional, lingkungan kebijakan yang luas, yang memiliki dampak terhadap lingkungan internasional (antar-negara). Isu yang diangkat berupa isu-isu global.

AKTOR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Aktor dari Jenis Institusi
(Adapted from Kingdon 1995)



1. Government (pemerintah) sebagai aktor, merupakan pemeran strategis dalam proses kebijakan publik.

Aktor dalam kelompok ini terdiri atas:

- a. Administrasi, secara umum aktor ini dapat diidentifikasi sebagai Lembaga kepresidenan (eksekutif), yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, dan pejabat teras dalam pemerintahan. Aktor ini berada pada tingkat makro dalam suatu proses kebijakan publik atau bisa disebut juga sebagai policy maker tertinggi (pada tingkat nasional). Selain itu, peran Lembaga kepresidenan sangat penting dalam proses kebijakan karena mempunyai struktur yang kuat dalam melakukan rekrutmen para policy maker yang berasal dari lingkaran eksekutif (Kusumanegara, 2010)

Dapat dikemukakan bahwa aktor ini memiliki resources yang besar dalam proses kebijakan publik terutama dari segi sumber dana maupun kewenangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa aktor dalam rumpun administrasi memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam hal perumusan kebijakan pada tingkat makro. Urgensi peran aktor ini dalam proses kebijakan publik dapat terlihat dari power dan resources-nya yang kuat.

B. Birokrat

- ❑ ADALAH pihak dalam organisasi formal dan hierarkis (birokrasi).
- ❑ Terdapat berbagai definisi terkait birokrasi dari para ahli dengan berbagai perspektifnya, namun secara umum birokrasi dipahami sebagai organisasi yang memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- ❑ Aparatur dalam birokrasi disebut sebagai birokrat. Birokrat merupakan pihak penting dalam proses kebijakan disebabkan keahlian yang mereka miliki, pengetahuan tentang institusi (sesuai dengan masa kerja), serta peran pentingnya dalam implementasi kebijakan (Kusumanegara, 2010).
- ❑ Birokrasi menjadi kekuatan utama dalam proses implementasi suatu kebijakan. Urgensi peran dan kemampuan birokrat dalam proses kebijakan publik menunjukkan strategisnya kewenangan birokrat khususnya dalam hal implementasi kebijakan publik, peran itu biasanya terlegalisasi dalam pola pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

c. Parlemen

- ❑ Parlemen merupakan lembaga yang tidak bisa diabaikan dalam proses kebijakan disebabkan konteks politiknya dalam institusi terutama dalam menentukan rancangan kebijakan.
- ❑ Parlemen memiliki modal representativitas politik yang bisa digunakan untuk membentuk opini publik (Kusumanegara, 2010). Parlemen secara ideal menjadi manifestasi kedaulatan rakyat, tentu memiliki peran yang penting dalam proses kebijakan publik, terutama urgensinya dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dalam konteks “penyambung lidah rakyat”.

2. Selanjutnya, Outside Government Actors merupakan aktor di luar pemerintah yang memiliki peran penting dalam proses kebijakan publik. Kelompok ini terdiri atas:

- a. Interest Group, yang didefinisikan sebagai asosiasi individu atau organisasi yang memiliki kesamaan perhatian/konsen, berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan biasanya dilakukan dengan melakukan lobi terhadap aktor pemerintah (Martini, 2012). Jenis interest group sangatlah beragam, ada sifatnya sementara dan ada pula yang permanen. Banyak interest group yang fokus dalam mempengaruhi kebijakan yang spesifik meskipun banyak pula yang lebih fokus pada kebijakan yang bersifat luas. Mekanisme kerja interest group dilakukan melalui eksekutif atau administratif, yudisial atau legislatif serta, opini publik (www.pearsonhighered.com).

Interest Group muncul dengan bermacam-macam motivasi seperti ekonomi (perusahaan perorangan atau kelompok), profesional (professional group seperti serikat buruh dan petani), public interest (pemerhati hak asasi manusia, pemerhati lingkungan dan lain-lain). Interest group dengan berbagai macam motivasi tersebut perlu dipastikan bahwa pengaruh yang dimiliki dapat dikontrol, transparan serta akuntabel sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi society. Lobi-lobi yang biasanya dilakukan oleh interest group jangan sampai menimbulkan conflict of interest (Martini, 2012).

b. Academics, Researcher, Consultant

- ❑ Seorang analis kebijakan atau pengambil kebijakan tidak mungkin bisa mengakses semua data yang dibutuhkan dalam memproduksi sebuah kebijakan publik yang efisien serta efektif.
- ❑ Peran dari seorang academics, researcher, consultant menjadi sangat penting untuk memberikan banyak preferensi dalam pengambilan kebijakan. Mereka biasanya memiliki akses yang besar terhadap data-data yang mampu memperkuat dasar pengambilan kebijakan.

c. Media

- ❑ Dalam proses pengambilan kebijakan, media memiliki peran penting untuk dapat menghegemoni semua pihak untuk dapat konsen terhadap seluruh produk kebijakan.
- ❑ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film poster, spanduk (kbbi. web.id). Media dapat diklasifikasikan menjadi dua; pertama, media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain. Kedua, social media merupakan alat yang menggambarkan generasi baru media digital, komputerisasi, jaringan informasi, atau teknologi informasi.
- ❑ Dalam konteks kebijakan publik, media juga biasa digunakan sebagai sarana politik. Media bisa digunakan untuk mengarahkan publik untuk konsen pada isu tertentu. Media massa merupakan sebuah cara pemerintah untuk mendorong publik berpartisipasi dalam governance utamanya untuk menciptakan checks and balances

d. Election Related Participants (Partai Politik)

- ❑ partai politik memegang peranan penting untuk menjaga eksistensi nilai-nilai demokrasi. Walaupun erat kaitannya dengan upaya meraih kekuasaan, tapi partai politik tetap memiliki peran penting dalam proses kebijakan publik.
- ❑ Menurut Winarno (2012: 133) dalam masyarakat modern, partai-partai politik sering melakukan “agregasi kepentingan”, partai politik berusaha untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan.
- ❑ Aktor ini berperan penting dalam menggalang opini publik yang bermanfaat dalam melontarkan isu-isu yang nantinya dikembangkan dalam tahap agenda setting. Partai politik juga menjalankan fungsi-fungsi politik yang penting dalam proses kebijakan (Kusumanegara, 2010).

e. Non Government Organization (NGO)

- ❑ NGO dalam kebijakan publik memiliki peranan advokasi, mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, Secara umum, proses advokasi yang dilakukan NGO berada di keseluruhan proses kebijakan, yaitu: agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.
- ❑ Dalam formulasi atau perumusan kebijakan, NGO dapat memberikan input berupa informasi tentang pilihan-pilihan alternatif kebijakan. Pilihan ini dapat didasarkan dari kajian yang dilakukan NGO sebelumnya.
- ❑ Dalam fase implementasi kebijakan, NGO dapat melakukan advokasi dengan melengkapi peran pemerintah dan memberikan input dalam konteks yang sifatnya lebih operasional.
- ❑ Lalu dalam monitoring dan evaluasi, NGO dapat melakukan review atas pelaksanaan kebijakan. NGO juga dapat menjadi media antara roses di mana individu atau kelompok dan organisasi pemerintah dan masyarakat terdampak kebijakan untuk berkomunikasi tentang apakah dampak kebijakan publik sudah sesuai dengan harapan masyarakat.

f. Private Sector

- ❑ Private Sector dapat dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan.
- ❑ Keterlibatan private sector dalam proses kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dikenal juga sebagai Public-Private Partnership.
- ❑ Tuntutan dilibatkannya private sector dalam siklus kebijakan publik didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud adalah dalam hal sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial.